

Netralitas Perguruan Tinggi dalam Kampanye

Oleh: Hendra Kurniawan

MASA kampanye telah tiba, artinya Pemilu 2014 tinggal hitungan hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah setiap hari terus melakukan *countdown* atau hitung mundur sebagai salah satu cara menyosialisasikan sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa tidak lama lagi pesta demokrasi itu akan dihelat. Tidak hanya KPU sebagai panitia maupun masyarakat yang harus siap menghadapi pemilu. Bahkan banyak pihak terutama partai politik, calon legislatif (*caleg*), hingga calon presiden (*capres*) sejak jauh-jauh hari sibuk melakukan sosialisasi meskipun masa kampanye belum resmi dimulai.

Sebelum kampanye resmi dimulai, sosialisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik peserta pemilu hingga capres tidak semuanya terang-terangan. Ada banyak upaya untuk melakukan sosialisasi secara rapi yang dibungkus oleh kemasan tertentu. Sebagai contoh di awal tahun 2014, banyaknya bencana alam di sisi lain justru menjadi "berkah" bagi partai-partai politik. Hampir semua peserta pemilu berlomba-lomba memberikan bantuan dan perhatian pada para korban bencana. Atribut partai bertebaran di tempat-tempat pengungsian. Meskipun ada juga yang konon katanya menyumbang semata-mata demi kemanusiaan.

Cara yang lebih elegan untuk memperkenalkan partai dan para kadernya yaitu melalui dialog dari kampus ke kampus. Beberapa partai maupun tokoh politik sudah cukup lama melakukan kegiatan seperti ini dan umumnya mendapat sambutan yang positif dari seluruh civitas akademik. Meskipun sifatnya dalam konteks ilmiah, misalnya ber-

tajuk dialog kebangsaan, tetapi adanya bumbu politis tentu sulit untuk dipungkiri.

Bagaimanapun penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan para petinggi dan tokoh partai dalam aura tahun politik tentu akan menjadi sorotan. Dalam konteks menyongsong Pemilu 2014 tentu kegiatan tatap muka dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan akademisi, menjadi kesempatan yang tepat untuk menyipkan visi-misi, pandangan, maupun agenda politik tertentu. Maka sekecil apapun dalam kegiatan semacam ini unsur politis tidak dapat dihindari seratus persen. Paling tidak ada upaya untuk menciptakan kesan (pencitraan) bagi partai maupun tokoh tertentu.

Dalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

St. Sunardi (2004) dalam orasi ilmiahnya pernah mengungkapkan bahwa perguruan tinggi layaknya tahta berkaki tiga yang memiliki perhatian pada ranah intelektual, moralitas, dan keberanian. Perguruan tinggi tidak perlu terjun langsung ke politik praktis karena akan memengaruhi objektivitas dalam pengalihan ilmu.

Pada masa pemberlakuan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), perguruan tinggi sempat sepi dari kegiatan politik. Akan tetapi seiring dengan bergulirnya reformasi, perguruan tinggi sebagai wadah kaum intelektual tentu harus memiliki sikap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Perguruan tinggi sifatnya independen dan terbuka terhadap berbagai hal termasuk yang berbau politik. Permasalahannya di masa kampanye dan menjelang pemilu seperti sekarang ini, bagaimana perguruan tinggi harus menyikapi segala kemungkinan agar jangan sampai terjebak pada kepentingan partai politik.

Terkait dengan peran perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, maka perguruan tinggi juga dituntut menjadi sarana mencerdaskan mahasiswa sebagai generasi muda dan masyarakat pada umumnya dalam berpolitik. Perguruan tinggi harus mampu membedakan antara kegiatan pendidikan politik yang berbasis akademik dengan politik praktis.

Persoalan netralitas perguruan tinggi dari kegiatan politik praktis sudah diatur secara tegas. Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum menyebutkan larangan kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah,

dan tempat pendidikan tersebut. Perguruan tinggi sebagai tempat pendidikan jelas terkena aturan ini. Salah satu indikasinya secara sederhana ialah kampus haruslah steril dari atribut maupun tanda-tanda kampanye peserta pemilu.

Meskipun demikian bukan berarti perguruan tinggi lantas menutup diri dan bersifat anti politik. Diperlukan sikap jeli dalam menangkap dan menyikapi persoalan politik agar perguruan tinggi tetap berpijak pada prinsip kenetralannya. Kegiatan akademik dalam kerangka pendidikan politik berupa dialog, seminar, hingga penelitian mengenai pemilu dapat menjadi alternatif. Dalam penyelenggaraan kegiatan semacam ini, perguruan tinggi harus membuka peluang bagi semua pihak dan tidak hanya pada pihak tertentu saja. Selain itu juga diperlukan sikap kehati-hatian agar jangan sampai aktivitas akademik tersebut ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Momentum pemilu menjadi kesempatan baik untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Untuk itu seluruh elemen perguruan tinggi seyogyanya dapat memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik, calon wakil rakyat, hingga calon presiden mengenai berbagai jalan keluar maupun solusi bagi permasalahan bangsa. Sikap netral dan tidak memihak pada kekuatan politik manapun akan menepatkan perguruan tinggi sebagai *agent of change* bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan berkualitas. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.